

PEMBANGUNAN INKLUSIF : INTEGRASI GENDER DALAM TEORI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Winda Khairum Nisa

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
khairumnissa04@gmail.com

Devi Intan Chadijah

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
intanchadiah@utu.ac.id

Yeni Sri Lestari

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar
yenisrilestari@utu.ac.id

Abstrak

Kajian analisis dari penelitian ini membahas mengenai integrasi perspektif gender dalam paradigma pembangunan partisipatif pada skala gampong sebagai strategi penting untuk mencapai pembangunan yang merangkul semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam penelitian ini menemukan bahwasanya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam berbagai kegiatan seperti musyawarah, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan masih terhalang oleh sejumlah rintangan struktural dan juga kultural. Penelitian ini menegaskan perlunya kesetaraan gender dan kebijakan yang peka agar semua kelompok, termasuk yang terpinggirkan dapat mendapatkan kesempatan dan sumber daya yang adil serta merata. Penerapan dari konsep pembangunan partisipatif yang mengarusutamakan gender diperkirakan dapat memperkuat keberlangsungan dari pembangunan dan bentuk gampong yang setara serta inklusif untuk seluruh masyarakat.

Kata Kunci: *Inklusif, Gender dan Pembangunan Partisipatif*

Abstract

This analytical study examines the integration of a gender perspective into the participatory development paradigm at the village level as a crucial strategy for achieving inclusive development. Using qualitative methods with a descriptive approach, the study found that the participation of women and vulnerable groups in various activities, such as deliberation, planning, and development implementation, remains hampered by a number of structural and cultural barriers. This research emphasizes the need for gender equality and sensitive policies to ensure that all groups, including marginalized groups, can access fair and equitable opportunities and resources. The application of a participatory development concept that mainstreams gender is expected to strengthen the sustainability of development and create an equitable and inclusive village for the entire community.

Keywords: *Inclusive, Gender and Participatory Development*

Article History: Received Dec 2025, Revised Mar 2026,
Accepted 1 Apr 2026, Available online 01 Jun 2026

Copyright: © 2026. The authors.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

A. Pendahuluan

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan yang mengarah pada berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial hingga infrastruktur.¹ Pembangunan gampong yang dilaksanakan secara terbuka untuk seluruh aspek masyarakat, serta menjamin keadilan bagi perempuan dan laki-laki merupakan salah satu hal penting dalam upaya memajukan kesejahteraan gampong secara global, salah satunya dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang bertujuan untuk mencapai suatu pembangunan yang berkembang dan berkelanjutan, yang mana didalamnya mencakup target dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.² Keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan ini bukan hanya sekedar hasil akhir, akan tetapi merupakan proses awal menuju kehidupan yang lebih adil, dengan terciptanya sebuah lingkungan gampong yang damai, makmur dan berkelanjutan.

Di Indonesia sendiri khususnya di Aceh, pembangunan gampong menghadapi hambatan yang rumit, salah satunya yaitu terkait dengan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Meskipun dengan sudah adanya aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai, bahwasanya seluruh aspek lapisan masyarakat yang ada di gampong memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan dan pembangunan gampong. Walaupun aturan ini sudah ditetapkan dan dijelaskan, realita yang terjadi dilapangan tidak lah sesuai dengan harapan yang seharusnya terjadi, dimana perempuan dan kelompok yang kurang beruntung masih kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap informasi, sumber daya, serta kesempatan dalam pengambilan sebuah keputusan.³ Kondisi ini semakin terlihat jelas karena kebijakan yang semestinya mendukung kesetaraan gender kerap hanya berupa formalitas diatas kertas. Kemudian sinergi antar lembaga masih belum optimal, pengalokasian dana khususnya untuk perempuan pun masih sangat terbatas, serta minim dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan.⁴

¹ Admin Bappeda, "Pengertian Pembangunan Menurut Prof," *Dr. Hj. Syamsiah Badruddin*. Retrieved from Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: <https://Bappeda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Pengertian-Pembangunan-Menurut-Prof-Dr-Hj-Syamsiah-Badruddin-m-Si-48>, 2015.

² Winfried Huck, "Goal 5 Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls," in *Sustainable Development Goals*, 2022, <https://doi.org/10.5771/9783748902065-213>.

³ Rahmawati Rahmawati, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYETARAAN GENDER DAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA," *Journal PPS UNISTI 2*, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22>.

⁴ Spto Budoyo and Marzellina Hardiyanti, "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender," *Administrative Law and Governance Journal 4*, no. 2 (2021): 239–51.

Kekhawatiran utama dari penelitian ini muncul dari ketidaksesuaian dalam kebijakan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat yang katanya merangkul semua pihak tanpa adanya diskriminasi, dengan kenyataan bahwasanya perempuan masih kerap terpinggirkan dalam setiap pengambilan keputusan yang ada di gampong. Di Aceh, salah satunya Gampong Gunong Kleng, perempuan sejatinya memiliki peran yang krusial serta turut berkontribusi dalam bidang ekonomi lokal, seperti di bidang pertanian, usaha kecil-kecilan, pariwisata hingga UMKM dan kewirausahaan.⁵ Meskipun demikian, peran itu seringkali tidak mendapat pengakuan ditingkat lokal, dikarenakan berbagai faktor struktural dan budaya yang masih kuat. Dimana norma patriarki yang kuat menjadikan kepemimpinan lebih didominasi oleh laki-laki hingga menyebabkan akses perempuan dalam pendidikan, sumber daya dan partisipasi dalam forum musyawarah gampong masih sangat terbatas.⁶ Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi dalam pembangunan masih belum benar-benar diterapkan secara adil dan setara antara laki-laki dan perempuan di tingkat akar rumput.

Beberapa peneliti berargumen, dalam lingkup pembangunan di Indonesia meskipun telah diterapkan kebijakan penyesuaian gender dan upaya program pembangunan gampong yang menyeluruh, pelaksanaan kebijakan tersebut masih terbatas pada pemenuhan kebutuhan nyata perempuan. Sementara itu, upaya dalam mengatasi isu-isu yang strategis seperti ketimpangan kekuasaan maupun struktur sosial masih belum menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya.⁷

Pendekatan Gender and Development menekankan bahwa untuk mencapai suatu kesetaraan gender yang setara, harus adanya perubahan dalam struktur sosial kemasyarakatan dan perubahan pada relasi kuasa yang mengalami kesenjangan. Akan tetapi hal ini masih menghadapi hambatan terutama pada gampong-gampong yang memiliki kondisi sosial dan sejarah konflik yang unik.⁸ Hasil analisis lainnya memperlihatkan bahwa meskipun beberapa daerah sudah mulai menerapkan program pembangunan desa yang partisipatif, tahapan perencanaan gampong harus benar-benar memperhatikan konsep dari kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI).⁹ Hal ini

⁵ M Aidil Fitra, "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG STUDI DI GAMPONG MEUNASAH BAKTRIENG, KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR" (Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2025).

⁶ Inayatillah Inayatillah et al., "Descriptive Analysis of the Implementation of Gender Responsive Policies for Poverty Alleviation in Aceh," *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 11, no. 1 (March 26, 2025): 109, <https://doi.org/10.22373/equality.v11i1.28706>.

⁷ Muhammad Syukri, "Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance," *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>.

⁸ Gunawan Adnan, "GENDER MAINSTREAMING IN THE CONTEXT OF ACEH DEVELOPMENT," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4284>.

⁹ Kementerian Keuangan RI et al., "Kesetaraan Gender, Disabilitas, Dan Inklusi Sosial Di Program SKALA," 2025, 1–4.

menekankan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlakuan yang setara dan merata dalam akses pengambilan sebuah keputusan terkait program-program pembangunan.¹⁰ Dengan terlaksanakannya perencanaan yang partisipatif, gampong bisa menjadi ruang pemberdayaan yang dapat memacu lahirnya kehidupan sosial yang lebih adil, ramah dan berkelanjutan untuk seluruh aspek kemasyarakatan.

Sejumlah studi sebelumnya telah menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan gampong di Aceh, khususnya dalam upaya pemberdayaan perempuan agar lebih berdaya dan menjadikan mereka sebagai aktor utama, bukan hanya sebagai penerima manfaat dalam semua tahapan pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan yang meliputi penyusunan strategi, pelaksanaan yang mencakup penerapan program di lapangan, hingga sampai pada tahap evaluasi yang menilai hasil dan pengaruh dari pembangunan tersebut.¹¹Partisipasi dari perempuan itu sendiri dapat meningkatkan efektivitas sebuah pembangunan yang ada di gampong, melalui pandangan unik mereka mengenai kebutuhan rumah tangga dan masyarakat. Meskipun adanya kemajuan dalam integrasi gender melalui forum dan program ekonomi. Hambatan seperti patriarki, mobilitas yang terbatas dan rendahnya representasi perempuan dalam pemerintah gampong, masih kerap membatasi peran mereka, serta mengurangi potensi pembangunan yang adil sehingga diperlukannya pendidikan terkait dengan kesetaraan gender dan pembaruan kebijakan lokal untuk mengatasinya.¹²

Meskipun kepemimpinan perempuan di tingkat gampong di Aceh telah menunjukkan kemungkinan besar, partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas yang disebabkan oleh hambatan struktural, budaya, ekonomi dan sosial. Program pengembangan kepemimpinan perempuan lokal, seperti pelatihan keterampilan dan mentoring berbasis komunikasi perlu diterapkan secara berkelanjutan guna mengatasi kesenjangan tersebut, sebagaimana yang terlihat dari rendahnya jumlah perempuan sebagai keuchik di Gampong Gunong Kleng. Hal ini memerlukan respon kebijakan yang terintegrasi yang memprioritaskan penguatan kemampuan

¹⁰ Rd Siti Sofro Sidiq and R. W. Willy Achmad, "Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Village Development," *LEGAL BRIEF* 10, no. 2 (2021).

¹¹ Mirza Fanzikri, "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN DESA DI ACEH," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.466>.

¹² Perencanaan PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Gampong Krueng Batu Kec Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan, and Provinsi Aceh, "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH," n.d.

perempuan melalui pendidikan politik dan pengawasan yang jelas untuk memperkuat demokrasi lokal.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendukung pembangunan gampong yang responsif, adil dan dapat memberdayakan kelompok yang terpinggirkan, terutama perempuan. Upaya ini diharapkan menjadi strategi penting dalam mencapai gampong yang berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan, serta menghormati prinsip kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman praktis tentang integrasi perspektif gender dalam pembangunan gampong serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kesetaraan gender di Aceh Barat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana prinsip kesetaraan gender yang diterapkan dalam sebuah proses Pembangunan yang ada di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meurebo, Kabupaten Aceh Barat. Pendekatan ini digunakan untuk memungkinkan analisis mendalam mengenai pengalaman pribadi, pandangan pribadi, serta hubungan sosial yang memengaruhi peran dan gender dalam pembangunan partisipatif ditingkat lokal. Selain itu penelitian ini juga didasarkan pada kerangka dari teori Gender and Developmen GAD, yang menekankan pentingnya hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif pembangunan, serta bagaimana pembangunan yang adil dan berkelanjutan dapat tercapai melalui pengaturan peran, akses, serta kontrol terhadap sumber daya yang seimbang, agar supaya semua kelompok masyarakat mendapatkan manfaat yang setara.¹⁴

Data dari penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu Focus Group Discussion (FDG), wawancara mendalam, observasi partisipatif dan pengumpulan dokumentasi.¹⁵ Wawancara dilakukan dengan beberapa aparatur gampong, beberapa masyarakat perempuan dan pemuda, serta beberapa anggota lembaga adat untuk melihat dan mengetahui bagaimana pembangunan yang ada di gampong memperhatikan peran dan kebutuhan dalam perspektif gender. Setelah itu melalui FDG, peneliti dapat menilai pendapat masyarakat mengenai kesetaraan gender dalam kegiatan pembangunan. Kemudian ada observasi partisipatif yang digunakan

¹³ Andi Sayumitra Arfriani Maifizar, "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PILKADA TAHUN 2024 DI GAMPONG GUNONG KLENG KABUPATEN ACEH BARAT," *Journal of Political Sphere (JPS)* 6, no. 1 (2025): 28–34, <https://doi.org/10.24815/jps.v6i1.48287>.

¹⁴ Arfriani Maifizar.

¹⁵ Anais Roque et al., "Community-Based Participant-Observation (CBPO): A Participatory Method for Ethnographic Research," *Field Methods* 36, no. 1 (2024): 80–90, <https://doi.org/10.1177/1525822X231198989>.

untuk melihat langsung bagaimana musyawarah gampong, pelaksanaan program pembangunan serta melihat proses pengambilan sebuah keputusan yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir ada kajian dokumentasi yang dilakukan dengan memeriksa dokumen perencanaan, laporan kegiatan dan data statistik gampong, kemudian setelah itu data yang diperoleh tersebut dilakukan pemeriksaan ulang dengan beberapa anggota masyarakat guna memastikan hasil tersebut sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Informan dalam penelitian ini dipilih melalui gabungan dua teknik sampling, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Pada tahap awal, peneliti, memakai teknik purposive sampling untuk menentukan beberapa informan kunci yang dianggap punya pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan topik penelitian, seperti tokoh masyarakat, aparatur gampong dan anggota kelompok perempuan di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya, peneliti menerapkan teknik snowball sampling untuk mendapatkan informan tambahan berdasarkan rekomendasi dari informan kunci yang telah diwawancarai. Melalui proses ini, jumlah subjek penelitian yang terlibat dalam penelitian ini adalah 15 informan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan melibatkan informan dari latar belakang dan sudut pandang yang berbeda.

Seluruh data dianalisis dengan cara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif melalui model analisis data interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti membaca ulang, mencatat serta merangkum informasi yang didapat dari wawancara dan observasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam penelitian. Tahapan terakhir ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi guna memastikan konsistensi serta arti dari temuan penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memahami pola integrasi gender, peran serta partisipasi perempuan dan laki-laki, hambatan dan peluang, serta kemampuan dan potensi lokal yang mendukung pembangunan gampong yang inklusif, adil serta berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial, budaya dan struktur lokal di Gampong Gunong Kleng, Aceh Barat.¹⁶

C. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini meneliti penerapan perspektif gender dalam pembangunan gampong yang berbasis partisipatif di Gampong Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, untuk mendukung pembangunan yang responsif gender, inklusif

¹⁶ Ferizal, Deti Mulyati, and Kusworo, "Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan Di Kecamatan Johanpahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh," *Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia* 11 (2019): 629–40, <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/231>.

dan adil serta berkelanjutan, terutama dalam memberdayakan perempuan dan kelompok yang terpinggirkan. Analisis menggunakan kerangka Gender and Development (GAD) untuk memahami pola integrasi gender, peran serta partisipasi perempuan dan laki-laki, hambatan dan peluang serta potensi lokal yang sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan inklusif. Hasil dari penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Kerangka Konseptual Gender dalam Pembangunan Partisipatif

Pada dasarnya pembangunan gampong yang inklusif memerlukan perubahan cara pandang masyarakat dari pendekatan Women in Development (WID) ke pendekatan Gender and Development (GAD). Pendekatan GAD tidak hanya menempatkan perempuan dalam sistem pembangunan yang sudah ada, tetapi juga berusaha mendorong perubahan hubungan gender dan struktur kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya di tingkat komunitas. Kerangka analisis yang dikembangkan oleh Caroline O.N. Moser digunakan sebagai panduan untuk memahami peran ganda perempuan, yaitu peran produktif, reproduktif dan sosial dalam komunitas. Selain itu, kerangka ini juga membedakan antara kebutuhan gender praktis dan kebutuhan gender strategis, dimana kebutuhan strategis ditunjukkan untuk perubahan struktur sosial serta penguatan posisi perempuan dalam pembangunan.

Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa integrasi sudut pandang gender dalam pembangunan gampong di Gampong Gunung Kleng belum berjalan dengan baik. Pembangunan masih lebih fokus pada memenuhi kebutuhan praktis perempuan, seperti memberikan dukungan finansial bagi keluarga, melibatkan perempuan dalam kegiatan sosial masyarakat, serta berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang bersifat pendukung. Sementara itu, usaha yang menuju pemenuhan kebutuhan strategis gender, seperti meningkatkan kemampuan perempuan untuk ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan, memperkuat posisi perempuan dalam forum pengambilan keputusan gampong, serta membuka ruang partisipasi yang setara dalam struktur kelembagaan gampong masih sangat sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering dipandang sebagai penerima manfaat program pembangunan, belum sepenuhnya sebagai aktor yang berperan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan gampong. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara berpikir serta komitmen yang lebih sistematis dari pemerintah gampong dan para pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk mendorong tercapainya pembangunan gampong yang lebih inklusif, partisipasi, dan responsif gender.

2. Mekanisme Partisipasi Perempuan dan Tantangan Implementasi dalam Perencanaan Pembangunan Gampong

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 6 pada Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 telah ditentukan dasar hukum yang mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan gampong, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil penelitian di Gampong Gunung Kleng, perempuan memang hadir dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes),tetapi partisipasi mereka dalam proses diskusi dan pengambilan keputusan masih terbatas. Dalam beberapa pertemuan perencanaan pembangunan, perempuan umumnya hadir sebagai peserta, tetapi jarang memberikan usulan atau terlibat aktif dalam penyusunan prioritas pembangunan. Keadaan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kehadiran perempuan secara resmi dalam forum pembangunan dengan kemampuan mereka untuk mempengaruhi keputusan penting yang diambil dalam musyawarah tersebut.

Selain itu, perhatian pembangunan gampong masih didominasi oleh pembangunan infrastruktur fisik, sementara isu yang lebih dekat dengan kebutuhan perempuan, seperti kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, masih belum menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan gampong. Hambatan yang mempengaruhi kondisi tersebut tidak hanya bersifat struktural tetapi juga kultural, seperti tingginya beban kerja domestik perempuan, keterbatasan akses terhadap informasi perencanaan pembangunan, kurangnya penyediaan forum yang sensitif gender, serta lemahnya organisasi perempuan yang mandiri di tingkat gampong. faktor-faktor tersebut secara keseluruhan membatasi partisipasi perempuan untuk berperan secara bermakna dalam proses pembangunan gampong.

3. Modal Sosial, Pemberdayaan Komunitas, dan Pembangunan Gampong Inklusif

Partisipasi perempuan yang konsisten dan juga signifikan lebih berpeluang dalam tercapainya partisipasi perempuan secara nyata, aktif dan juga berpengaruh dengan melalui wadah yang kolektif seperti Balee Inong yang berperan sebagai ruang untuk perempuan dalam merumuskan kebutuhan bersama, kemudian menyusun usulan yang berspektif gender, dan terakhir yaitu melakukan advokasi secara terpadu.¹⁷ Selain itu, pandangan terkait dengan responsif gender (GRD) merupakan mekanisme penting dalam memastikan dana desa dapat dialokasikan sesuai dengan kebutuhan perempuan. Namun hasil yang didapat di Gampong Gunung Kleng menunjukkan bahwa wadah kolektif perempuan seperti Balee Inong belum terbentuk. Ketidakhadiran lembaga tersebut menyebabkan partisipasi perempuan masih bersifat individual dan belum terorganisasi secara sistematis dalam sebuah proses perencanaan ataupun dalam pengambilan keputusan pembangunan gampong.

¹⁷ Marizal, Akmal, and Putra, "Inong Balee Dan Balee Inong;" 6 (2020): 192–206.

4. Kesetaraan Gender dan Perencanaan Pembangunan Berdampak

Pendekatan pembangunan yang berfokus pada kekuatan dan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat atau *Asset-Based Community Development* (ABCD) menekankan pada pembangunan yang berawal dari kekuatan dan juga potensi yang telah dimiliki oleh masyarakat.¹⁸ Melalui pendekatan ini, aset-aset perempuan seperti pengetahuan lokal mengenai pertanian, keterampilan dalam membuat kerajinan dan makanan tradisional, kemudian jaringan sosial yang kuat serta pengalaman dalam pengelolaan rumah tangga serta komunitas yang diakui dan dimanfaatkan sebagai modal utama dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, sekaligus dengan menjaga kelestarian warisan budaya.

Namun, hasil analisis di Gampong Gunong Kleng menunjukkan bahwa metode tersebut belum diterapkan secara nyata. Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 informan penelitian yang terdiri dari aparat gampong dan kelompok perempuan, diketahui bahwa potensi dan aset yang dimiliki perempuan belum teridentifikasi dengan sistematis dan belum dimanfaatkan secara maksimal dalam proses pembangunan gampong. Selain itu, berdasarkan analisis dokumen perencanaan pembangunan gampong seperti RKP Gampong dan hasil musyawarah perencanaan fasilitas fisik seperti pembangunan infrastruktur, sedangkan pelibatan perempuan serta pemanfaatan pengetahuan dan kearifan lokal belum jelas dimasukkan dalam perencanaan penguatan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kontribusi perempuan dalam meningkatkan ekonomi lokal serta menjaga kelestarian budaya belum terlihat secara signifikan dan cenderung masih bersifat pasif. Temuan ini juga sesuai dengan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan gampong masih seringkali terbatas akibat kurangnya akses terhadap proses pengambilan keputusan serta belum optimalnya kebijakan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal.¹⁹

5. Kepemimpinan Transformatif Kepala Gampong dalam Memperkuat Pembangunan Inklusif

Untuk mencapai sebuah kesetaraan gender yang nyata dalam perencanaan pembangunan gampong, proses dari demokrasi yang jujur serta terbuka dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong amat sangat diperlukan. Dalam

¹⁸ Aulia Rahmawati et al., "Potensi Implementasi Pendekatan Asset Based Community Development (Abcd) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Wisata Cigadung Ifally Pramesia Putri Peachilia," *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial* 23, no. 1 (2024): 118–41, <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/index>.

¹⁹ D Andryanto, "Women's Participation in Village Development Planning: Case of Indonesia.," *Journal of Public Administration Studies*, 2021.

proses perencanaan [embangan gampong, kepemimpinan keuchik perempuan di Gampong Gunong Kleng menunjukkan adanya upaya untuk membuka ruang partisipasi masyarakat, meskipun belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan perangkat gampong serta tokoh masyarakat, keterlibatan masyarakat, termasuk perempuan masih cenderung terjadi dalam forum formal seperti musyawarah perencanaan pembangunan. Salah satu informan menyatakan bahwa “keuchik tetap mengundang masyarakat untuk hadir dalam musyawarah, namun keterlibatan perempuan masih belum terlalu aktif” (wawancara dengan masyarakat, 2025).



Dokumentasi 1: masyarakat laki-laki dan aparat



Dokumentasi 2: masyarakat perempuan



Dokumentasi 3: tokoh adat

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah terdapat ruang partisipasi, kedekatan dan keterlibatan keuchik dengan kelompok perempuan di gampong belum terbangun secara kuat. Dengan demikian, praktik kepemimpinan yang dijalankan belum sepenuhnya mencerminkan kepemimpinan partisipatif yang ideal, yang tidak hanya membuka ruang formal, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dan substansial dari seluruh kelompok masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan tersebut belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Beberapa informan mengungkapkan

bahwa keterlibatan masyarakat masih terbatas pada forum formal dan belum sepenuhnya mempengaruhi proses pengambilan keputusan secara substansif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip kepemimpinan partisipatif dan praktik yang terjadi di tingkat gampong. Jika dikaitkan dengan teori kepemimpinan inklusif dan kesetaraan gender, keberadaan keuchik perempuan seharusnya tidak hanya menghadirkan representasi perempuan dalam struktur pemerintahan gampong, akan tetapi juga mampu memperkuat keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta keadilan gender dalam proses pembangunan. Dengan demikian, kepemimpinan keuchik perempuan di Gampong Gunong Kleng dapat dipahami sebagai proses transformasi sosial yang masih menghadapi tantangan struktural dan kultural dalam mewujudkan pembangunan gampong yang benar-benar inklusif.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan perspektif gender dalam pembangunan gampong berbasis partisipatif di Gampong Gunong Kleng belum berjalan efektif untuk menciptakan pembangunan yang responsif gender, inklusif dan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan masih fokus pada kebutuhan praktis perempuan, sedangkan kebutuhan strategis yang berhubungan dengan perubahan relasi kuasa dan peningkatan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan belum terpenuhi. Partisipasi perempuan dalam musyawarah pembangunan masih terbatas dan lebih bersifat simbolis, terpengaruh oleh hambatan struktural dan kultural seperti beban domestik, kurangnya akses informasi, serta lemahnya kelembagaan perempuan. Selain itu, kurangnya wadah kolektif perempuan dan belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal melalui pendekatan berbasis aset menyebabkan kontribusi perempuan dalam pembangunan belum mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pembangunan gampong yang partisipatif dan adil gender, diperlukan usaha yang lebih sistematis melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan perempuan, integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan, serta kepemimpinan yang lebih transformatif dan inklusif.

Daftar Pustaka

- Adnan, Gunawan. "GENDER MAINSTREAMING IN THE CONTEXT OF ACEH DEVELOPMENT." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4284>.
- Andryanto, D. "Women's Participation in Village Development Planning: Case of Indonesia." *Journal of Public Administration Studies*, 2021.
- Arfriani Maifizar, Andi Sayumitra. "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PILKADA TAHUN 2024 DI GAMPONG GUNONG KLENG KABUPATEN ACEH BARAT." *Journal of Political Sphere (JPS)* 6, no. 1 (2025): 28–34.

- <https://doi.org/10.24815/jps.v6i1.48287>.
- Bappeda, Admin. "Pengertian Pembangunan Menurut Prof." *Dr. Hj. Syamsiah Badruddin*. Retrieved from Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: <https://Bappeda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Pengertian-Pembangunan-Menurut-Prof-Dr-Hj-Syamsiah-Badruddin-m-Si-48>, 2015.
- Budoyo, Sapto, and Marzellina Hardiyanti. "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 239–51.
- Fanzikri, Mirza. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN DESA DI ACEH." *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.466>.
- Ferizal, Deti Mulyati, and Kusworo. "Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan Di Kecamatan Johanpahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh." *Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia* 11 (2019): 629–40. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/231>.
- Fitra, M Aidil. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG STUDI DI GAMPONG MEUNASAH BAKTRIENG, KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR." Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2025.
- Huck, Winfried. "Goal 5 Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls." In *Sustainable Development Goals*, 2022. <https://doi.org/10.5771/9783748902065-213>.
- Inayatillah, Inayatillah, Musdawati Musdawati, Cut Dian Fitri, and Nelli Mardhiah. "Descriptive Analysis of the Implementation of Gender Responsive Policies for Poverty Alleviation in Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 11, no. 1 (March 26, 2025): 109. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i1.28706>.
- Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, BAPPENAS, and Australian Government. "Kesetaraan Gender, Disabilitas, Dan Inklusi Sosial Di Program SKALA," 2025, 1–4.
- Marizal, Akmal, and Putra. "Inong Balee Dan Balee Inong;" 6 (2020): 192–206. PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Gampong Krueng Batu Kec Kluet Utara, Perencanaan, Kabupaten Aceh Selatan, and Provinsi Aceh. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH," n.d.
- Rahmawati, Aulia, Ifally Pramesia Putri Peachilia, Diva Salma Hanifah, and Sahadi Humaedi. "Potensi Implementasi Pendekatan Asset Based Community Development (Abcd) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Wisata Cigadung Ifally Pramesia Putri Peachilia." *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial* 23, no. 1 (2024): 118–41. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/index>.
- Rahmawati, Rahmawati. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYETARAAN GENDER DAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA." *Journal PPS UNISTI* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22>.
- Roque, Anais, Amber Wutich, Alexandra Brewis, Melissa Beresford, Laura Landes, Olga Morales-Pate, Ramon Lucero, et al. "Community-Based Participant-Observation

- (CBPO): A Participatory Method for Ethnographic Research." *Field Methods* 36, no. 1 (2024): 80–90. <https://doi.org/10.1177/1525822X231198989>.
- Sidiq, Rd Siti Sofro, and R. W. Willya Achmad. "Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Village Development." *LEGAL BRIEF* 10, no. 2 (2021).
- Syukri, Muhammad. "Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>.
- Adnan, Gunawan. "GENDER MAINSTREAMING IN THE CONTEXT OF ACEH DEVELOPMENT." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 16, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4284>.
- Andryanto, D. "Women's Participation in Village Development Planning: Case of Indonesia." *Journal of Public Administration Studies*, 2021.
- Arfriani Maifizar, Andi Sayumitra. "PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PILKADA TAHUN 2024 DI GAMPONG GUNONG KLENG KABUPATEN ACEH BARAT." *Journal of Political Sphere (JPS)* 6, no. 1 (2025): 28–34. <https://doi.org/10.24815/jps.v6i1.48287>.
- Bappeda, Admin. "Pengertian Pembangunan Menurut Prof." *Dr. Hj. Syamsiah Badruddin*. Retrieved from Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: <https://Bappeda.Bulelengkab.Go.Id/Informasi/Detail/Artikel/Pengertian-Pembangunan-Menurut-Prof-Dr-Hj-Syamsiah-Badruddin-m-Si-48>, 2015.
- Budoyo, Sapto, and Marzellina Hardiyanti. "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender." *Administrative Law and Governance Journal* 4, no. 2 (2021): 239–51.
- Fanzikri, Mirza. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM KELEMBAGAAN DAN PEMBANGUNAN DESA DI ACEH." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 5, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.466>.
- Ferizal, Deti Mulyati, and Kusworo. "Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Khusus Perempuan Di Kecamatan Johanpahlawan Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh." *Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia* 11 (2019): 629–40. <https://ejournal.goacademica.com/index.php/jv/article/view/231>.
- Fitra, M Aidil. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN GAMPONG STUDI DI GAMPONG MEUNASAH BAKTRIENG, KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA, KABUPATEN ACEH BESAR." Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2025.
- Huck, Winfried. "Goal 5 Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls." In *Sustainable Development Goals*, 2022. <https://doi.org/10.5771/9783748902065-213>.
- Inayatillah, Inayatillah, Musdawati Musdawati, Cut Dian Fitri, and Nelli Mardhiah. "Descriptive Analysis of the Implementation of Gender Responsive Policies for Poverty Alleviation in Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 11, no. 1 (March 26, 2025): 109. <https://doi.org/10.22373/equality.v11i1.28706>.
- Kementerian Keuangan RI, Kementerian Dalam Negeri RI, BAPPENAS, and Australian Government. "Kesetaraan Gender, Disabilitas, Dan Inklusi Sosial Di Program SKALA," 2025, 1–4.
- Marizal, Akmal, and Putra. "Inong Balee Dan Balee Inong;" 6 (2020): 192–206.

- PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Gampong Krueng Batu Kec Kluet Utara, Perencanaan, Kabupaten Aceh Selatan, and Provinsi Aceh. "PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM MUSYAWARAH," n.d.
- Rahmawati, Aulia, Ifally Pramesia Putri Peachilia, Diva Salma Hanifah, and Sahadi Humaedi. "Potensi Implementasi Pendekatan Asset Based Community Development (Abcd) Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Kampung Wisata Cigadung Ifally Pramesia Putri Peachilia." *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerja Sosial* 23, no. 1 (2024): 118–41. <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/index>.
- Rahmawati, Rahmawati. "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYETARAAN GENDER DAN PERANAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DESA." *Journal PPS UNISTI* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.48093/jiask.v2i2.22>.
- Roque, Anais, Amber Wutich, Alexandra Brewis, Melissa Beresford, Laura Landes, Olga Morales-Pate, Ramon Lucero, et al. "Community-Based Participant-Observation (CBPO): A Participatory Method for Ethnographic Research." *Field Methods* 36, no. 1 (2024): 80–90. <https://doi.org/10.1177/1525822X231198989>.
- Sidiq, Rd Siti Sofro, and R. W. Willya Achmad. "Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Village Development." *LEGAL BRIEF* 10, no. 2 (2021).
- Syukri, Muhammad. "Gender Policies of the New Developmental State: The Case of Indonesian New Participatory Village Governance." *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 42, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1177/18681034221149750>.